

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Banyumas 2021

Secara morfologis dan melihat luas wilayah tersebut, Kabupaten Banyumas terdiri atas daratan dan pegunungan yang membentang. Pertama, Kabupaten Banyumas memiliki daratan rendah maupun tinggi dengan kecenderungan difungsikan sebagai lahan untuk dijadikan tanah pertanian, pemukiman dan pekarangan. Kedua, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan bentangan pegunungan, seringkali dimanfaatkan dan difungsikan sebagian sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat serta dijadikan hutan tropis yang terletak pada bagian selatan dari lereng Gunung Slamet.

Melihat dari aspek konektivitasnya, Kabupaten Banyumas memiliki posisi yang sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas provinsi bagian tengah sebagai penghubung di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan letaknya yang diapit oleh kabupaten-kabupaten sebagai daerah pemasok kebutuhan pangan dan sektor penting lainnya. Oleh sebab itu, kendaraan-kendaraan pemasok kebutuhan bahan pokok, industri dan transportasi penting lainnya sering melintas wilayah Kabupaten Banyumas dan jauh lebih efisien.

Tabel 2.1
Letak Geografis Kabupaten Banyumas

No	Batas Wilayah	Keterangan
1.	Sebelah Utara	Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Cilacap
3.	Sebelah Barat	Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

No	Batas Wilayah	Keterangan
4.	Sebelah Timur	Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2020

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang di sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Cilacap di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat, serta berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Dengan letak yang sangat berdekatan tersebut, Kabupaten Banyumas memiliki posisi yang sangat strategis karena dapat menggenjot perekonomian dengan cara meningkatkan mobilisasi Kabupaten Banyumas sendiri maupun kabupaten-kabupaten lainnya yang berdekatan.

2.1.2 Luas Wilayah Kabupaten Banyumas

Secara administratif, Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 27 kecamatan dengan perincian dari 301 desa dan 30 kelurahan.

Tabel 2.2
Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase
1.	Lumbir	102,66	7,73
2.	Wangon	60,78	4,57

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase
3.	Jatilawang	48,16	3,62
4.	Rawalo	49,64	3,73
5.	Kebasen	54,00	4,06
6.	Kemranjen	60,71	4,57
7.	Sumpiuh	60,01	4,52
8.	Tambak	52,03	3,91
9.	Somagede	40,11	3,02
10.	Kalibagor	35,73	2,69
11.	Banyumas	38,09	2,86
12.	Patikraja	43,23	3,25
13.	Purwojati	37,86	2,85
14.	Ajibarang	66,50	5,00
15.	Gumelar	93,95	7,07
16.	Pekuncen	92,70	6,98
17.	Cilongok	105,34	7,93
18.	Karanglewas	32,50	2,44
19.	Kedungbanteng	60,22	4,53
20.	Baturraden	45,53	3,42
21.	Sumbang	53,42	4,02
22.	Kembaran	25,92	1,95
23.	Sokaraja	29,92	2,25
24.	Purwokerto Selatan	13,75	1,03
25.	Purwokerto Barat	7,40	0,55
26.	Purwokerto Timur	8,42	0,63
27.	Purwokerto Utara	9,01	0,67
Kabupaten Banyumas		1.327,59	100%

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2020

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda-

beda. Adapun dari total 27 kecamatan yang tersebar, Kecamatan Cilongok menempati posisi pertama kecamatan terluas dengan luas total wilayah 105,34 km² atau dengan presentase 7,93%. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat menjadi kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan luas 7,40 km² atau hanya 0,55% saja.

2.1.3 Iklim

Tidak berbeda dengan musim yang ada di Indonesia, Kabupaten Banyumas memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Menurut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, selama tahun 2019 telah terjadi setidaknya 114 kali hari hujan dengan intensitas curah hujan berkisar antara 1 mm³ sampai dengan 595 mm³. Adapun jumlah hari hujan terbanyak tercatat pada bulan Februari dan Desember dengan tingkat presipitasi terbanyak pada bulan Februari, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di
Kabupaten Banyumas 2019

Bulan	Curah Hujan (mm³)	Hari Hujan
Januari	364	18
Februari	595	19
Maret	441	18
April	249	12
Mei	117	6
Juni	11	2

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Juli	3	2
Agustus	6	1
September	1	0
Oktober	8	1
November	197	16
Desember	252	19

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

2.1.4 Kondisi Penduduk Kabupaten Banyumas

Ditinjau dari aspek demografis atau kependudukannya, Kabupaten Banyumas memiliki tingkat laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk pada setiap kecamatan yang beragam bergantung pada faktor-faktor yang ada di setiap kecamatannya. Adapun secara umum faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu: angka kelahiran (fertilitas), angka kematian (mortalitas) dan migrasi penduduk. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk 2019 & Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun
2018-2019 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Penduduk (ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1.	Lumbir	26.836	26.224	53.060	2,65
2.	Wangon	44.067	43.012	87.079	2,53
3.	Jatilawang	35.730	35.093	70.823	3,15

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Penduduk (ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
4.	Rawalo	28.206	27.476	55.682	2,84
5.	Kebasen	35.325	34.328	69.653	3,47
6.	Kemranjen	38.501	37.343	75.844	2,96
7.	Sumpiuh	30.744	29.958	60.702	2,49
8.	Tambak	26.487	26.290	52.777	2,80
9.	Somagede	19.644	19.670	39.314	2,26
10.	Kalibagor	29.115	28.609	57.724	3,15
11.	Banyumas	27.813	27.691	55.504	2,19
12.	Patikraja	30.774	30.683	61.457	2,43
13.	Purwojati	19.682	19.266	38.948	2,90
14.	Ajibarang	53.915	52.450	106.365	2,51
15.	Gumelar	28.286	27.408	55.694	2,88
16.	Pekuncen	40.154	38.934	79.088	2,54
17.	Cilongok	65.514	63.728	129.242	2,95
18.	Karanglewas	34.506	33.413	67.919	3,52
19.	Kedungbanteng	31.874	31.110	62.984	3,40
20.	Baturraden	27.849	27.527	55.376	2,56
21.	Sumbang	47.511	46.327	93.838	3,02
22.	Kembaran	41.806	40.731	82.537	2,60
23.	Sokaraja	45.356	45.281	90.637	2,98
24.	Purwokerto Selatan	37.719	37.717	75.436	2,35
25.	Purwokerto Barat	27.076	27.515	54.591	1,74
26.	Purwokerto Timur	29.193	29.802	58.995	1,69
27.	Purwokerto Utara	24.410	24.473	48.883	1,96
Kabupaten Banyumas		928.093	912.059	1.840.152	2,69

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Berdasarkan dari penjelasan tabel di atas, Kecamatan Cilongok memiliki jumlah penduduk terbesar sebesar 129.242 (7%) jiwa.

Sedangkan Kecamatan Purwojati terkecil dari segi jumlah penduduk, yakni sebesar 38.948 jiwa (2,1%). Jika dilihat dalam cakupan kabupaten, Banyumas memiliki tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,69%, artinya Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori laju pertumbuhan yang tinggi, kecamatan dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Karanglewas sebesar 3,52%.

Berikut tabel data kepadatan penduduk per kecamatan se-Kabupaten Banyumas:

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk per-Kecamatan

No	Kecamatan	Presentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per-km²)
1.	Lumbir	2,88	517
2.	Wangon	4,73	1.433
3.	Jatilawang	3,85	1.471
4.	Rawalo	3,03	1.122
5.	Kebasen	3,79	1.290
6.	Kemranjen	4,12	1.249
7.	Sumpiuh	3,30	1.012
8.	Tambak	2,87	1.014
9.	Somagede	2,14	980
10.	Kalibagor	3,14	1.616
11.	Banyumas	3,02	1.457
12.	Patikraja	3,34	1.422
13.	Purwojati	2,12	1.029
14.	Ajibarang	5,78	1.599
15.	Gumelar	3,03	593

No	Kecamatan	Presentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per-km ²)
16.	Pekuncen	4,30	853
17.	Cilongok	7,02	1.227
18.	Karanglewas	3,69	2.091
19.	Kedungbanteng	3,42	1.046
20.	Baturraden	3,01	1.216
21.	Sumbang	5,10	1.757
22.	Kembaran	4,49	3.184
23.	Sokaraja	4,93	3.029
24.	Purwokerto Selatan	4,10	5.486
25.	Purwokerto Barat	2,97	7.377
26.	Purwokerto Timur	3,21	7.007
27.	Purwokerto Utara	2,66	5.425
Kabupaten Banyumas		100,00	1.275

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Data tabel di atas, menunjukkan bahwa Kecamatan Purwokerto Barat menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 7.377 penduduk per-km² dan Kecamatan Lumbir kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 517 penduduk per-km².

2.1.5 Kondisi Perekonomian

Sektor perekonomian penting dalam memetakan apakah suatu wilayah dapat dikatakan maju atau tidak berdasar sektor pengeluaran komoditas per kapita, yaitu dengan memetakan seberapa besar presentase tingkat konsumsi dan pengeluarannya dalam mencukupi pangan sehari-hari. Berikut tabel data presentase pengeluaran per kapita dam sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Banyumas:

Tabel 2.6
Presentase Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2018 & 2019 (%)

No	Kelompok Komoditas	2018	2019
	Makanan		
1	Padi-padian	11,22	9,97
2	Umbi-umbian	0,90	0,87
3	Ikan/Udang/Kerang/Cumi	3,97	3,69
4	Daging	4,00	3,88
5	Telur dan Susu	5,68	5,94
6	Sayur-sayuran	7,98	7,98
7	Kacang-kacangan	2,47	2,48
8	Buah-buahan	7,52	5,71
9	Minyak dan Kelapa	2,54	2,29
No	Kelompok Komoditas	2018	2019
10	Bahan minuman	3,57	3,46
11	Bumbu-bumbuan	1,94	1,94
12	Konsumsi lainnya	1,91	1,87
13	Makanan dan minuman jadi	34,31	38,60
14	Rokok	11,99	11,32
Jumlah Makanan		49,81	47,69
	Bukan Makanan		
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	43,34	44,21
2	Aneka komoditas dan jasa	27,91	29,44
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	6,23	6,35

4	Komoditas tahan lama	11,60	10,24
5	Pajak, pungutan dan asuransi	5,97	5,88
6	Keperluan pesta dan upacara	4,95	3,88
Jumlah Bukan Makanan		50,19	52,31

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Data di atas, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018 dan 2019, terjadi penurunan presentase bahan makanan yang semula berkisar pada 49,81% menjadi 47,69%. Sebaliknya, terjadi kenaikan tingkat pengeluaran konsumsi pada sektor bukan makanan. Kenaikan paling besar terjadi pada sektor komoditas barang dan jasa yakni sebesar 29,44% pada tahun 2019. Kemudian untuk jumlah komoditas bukan makanan terjadi kenaikan yang semula 50,19% menjadi 52,31% di Kabupaten Banyumas.

Selain sektor pengeluaran komoditas per kapita, penggolongan pengeluaran masyarakat juga perlu untuk ditunjukkan. Berikut tabel data presentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Banyumas tahun 2018 dan 2019:

Tabel 2.7
Presentase Penduduk Menurut Golongan
Pengeluaran per Kapita Sebulan
Tahun 2018 & 2019 (%)

No.	Kelompok	2018	2019
1.	>150.000	-	-
2.	150.000 - 199.999	0,12	0,07

No	Kelompok	2018	2019
3.	200.000 – 299.999	4,36	2,69
4.	300.000 – 499.999	20,30	17,46
5.	500.000 – 749.999	23,70	24,94
6.	750.000 – 999.999	16,07	17,36
7.	1.000.000 – 1.499.999	20,03	21,32
8.	> 1.500.000	15,42	16,17

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2020

Berdasar data dalam table di atas dapat disimpulkan bahwa golongan dengan tingkat pengeluaran bulanan terbesar berkisar di antara Rp 500.000 – 749.999 dengan presentase 24,94%. Disamping tingkat pengeluaran penduduk dan jenis bahan kebutuhan pokok, kemiskinan di Kabupaten Banyumas:

Tabel 2.8
Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas
Tahun 2012 - 2019 (%)

No.	Tahun	Presentase Penduduk Miskin
1.	2012	19,44
2.	2013	18,44
3.	2014	17,45
4.	2015	17,52
5.	2016	17,23
6.	2017	17,05
7.	2018	13,50
8.	2019	12,53

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2020

Jika dilihat pada tabel di atas, kemiskinan secara presentase dari tahun 2012-2020 mengalami penurunan menjadi 12,53% pada tahun 2020. Artinya, penduduk semakin sejahtera.

2.1.6 Visi dan Misi Kabupaten Banyumas

Visi :

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”.

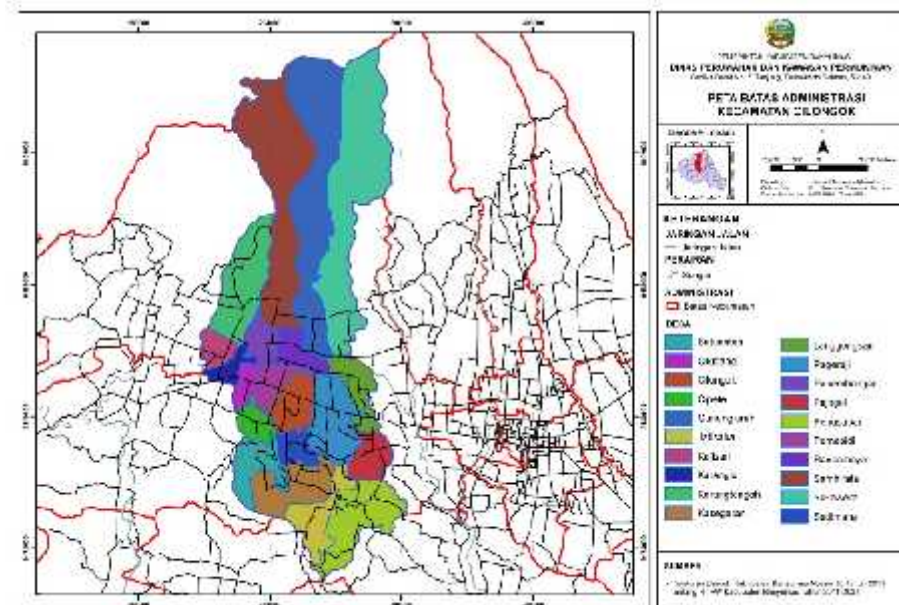
Misi :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

2.1 Kecamatan Cilongok dan Desa Rancamaya

2.2.1 Profil Kecamatan Cilongok

Gambar 2.2
Peta Kecamatan Cilongok



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Banyumas 2021

Dari aspek letak geografisnya, Kecamatan Cilongok hanya berjarak ± 14 km dari pusat Kabupaten Banyumas. Kecamatan dengan luas wilayah 10.543,126 Ha atau seluas 105,34 km². Berdasar lokasinya, memiliki batas-batas wilayah dengan wilayah lainnya sebagai berikut:

Tabel 2.9
Batas-Batas Wilayah Kecamatan Cilongok

No	Batas Wilayah	Keterangan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Pemalang
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Purwojati
3.	Sebelah Barat	Kecamatan Ajibarang
4.	Sebelah Timur	Kecamatan Karanglewas

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Kecamatan Cilongok termasuk ke dalam kecamatan dengan jumlah penduduk besar dan memiliki wilayah yang luas. Berdasar pembagian wilayahnya memiliki 20 desa.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kecamatan Cilongok Tahun 2019

No	Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
1.	Batuanten	5.255	4,04	1.300,74
2.	Kasegeran	5.027	6,16	816,07
3.	Jatisaba	5.335	6,11	873,16
4.	Panusupan	9.479	8,64	1.097,11
5.	Pejogol	4.759	2,94	1.618,71
6.	Pageraji	11.661	6,41	1.819,19
7.	Sudimara	4.698	1,87	2.512,30
8.	Cilongok	9.724	3,77	2.579,31
9.	Cipete	4.513	2,95	1.529,83
10.	Cikidang	3.273	1,70	1.925,29
11.	Pernasidi	6.250	2,37	2.637,13
12.	Langgongsari	8.129	4,09	1.987,53
13.	Rancamaya	4.486	2,18	2.057,80
14.	Panembangan	5.456	2,58	2.114,73
15.	Karanglo	3.955	1,71	2.312,87
16.	Kalisari	4.935	2,04	2.419,12
17.	Karangtengah	9.930	17,22	576,66
18.	Sambirata	5.874	9,70	605,57
19.	Gununglurah	8.325	8,78	948,18
20.	Sokawera	8.565	10,08	849,70

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

2.2.2 Profil Desa Rancamaya

a. Sejarah Desa

Desa Rancamaya belum memiliki dokumen sejarah. Menurut pemerintahan desa, keberadaan terkait legenda dan asal desa masih dalam pengeksploasian.⁷² Dilihat dari histori kepemimpinan desa sejak dulu, Desa Rancamaya dikepalai oleh Kepala Desa yang bernama Wirandriya sebagai kepala desa pertama pada tahun 1830 hingga 1850. Semasa kepemimpinannya, penduduk Desa Rancamaya hanya berkisar ± 23 kepala keluarga. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat, yaitu:

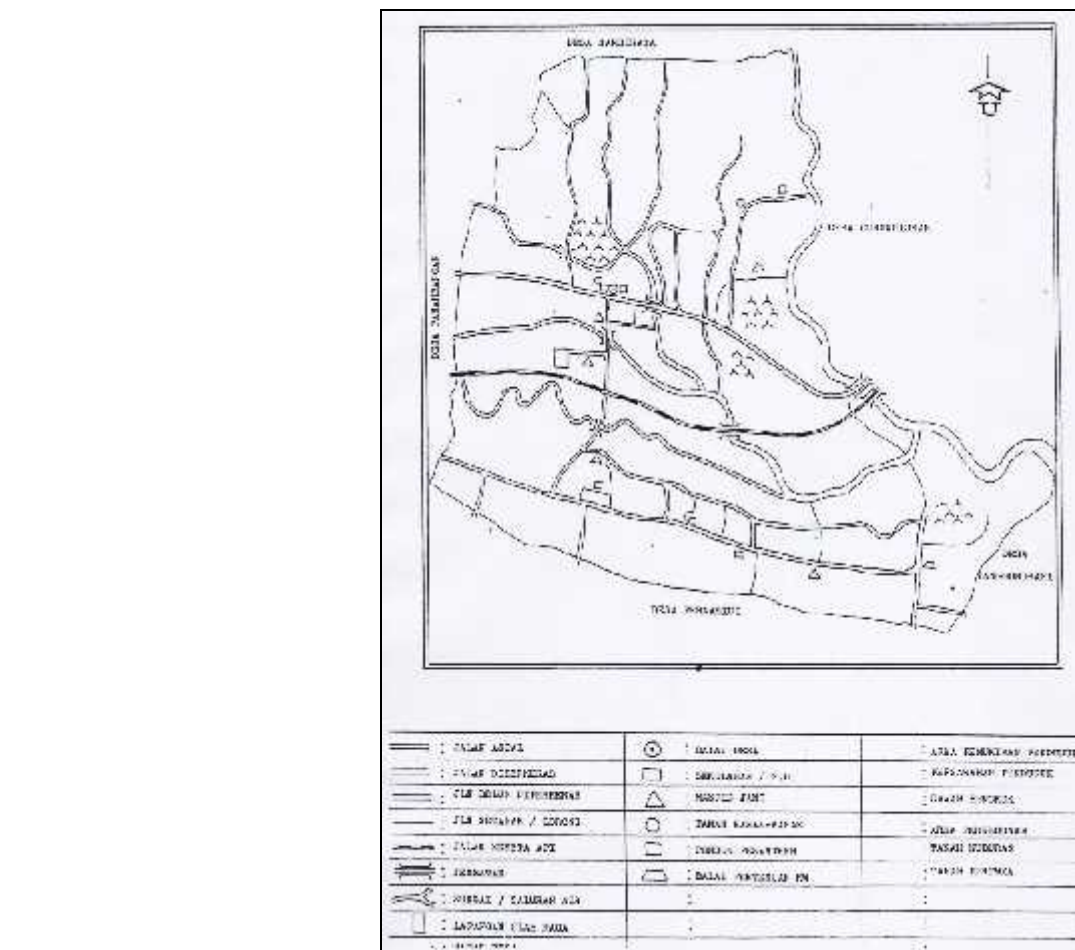
1. Wirandriya (1830-1850)
2. Arsanangga (1850-1855)
3. Asnawi (1885-1920)
4. Suradipa (1920-1920)
5. Aslam (1920-1940)
6. Wiryasukarto (1940-1960)
7. Soekandar (1960-1987)
8. Suwarno (1988-1998)
9. Abukusni (1998-2007 & 2007-2013)
10. Amron (2013-2019 & 2019-sekarang)

⁷² Wawancara Disun, Ketua BPD Desa Rancamaya Kec. Cilongok, 09 Februari 2021 pukul 10.40 WIB

b. Kondisi Geografis

Secara geografis, Desa Rancamaya memiliki luas 114,795 Ha dan terletak pada ketinggian 225 meter di atas permukaan air laut. Adapun wilayah desa ini berbatasan langsung dengan beberapa wilayah lainnya, yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Sambirata, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pernasidi, sebelah barat berbatasa dengan Desa Panembangan, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Gununglurah

Gambar 2.3
Peta Desa Rancamaya



Sumber: Pemerintah Desa Rancamaya 2021

Secara administratif, Desa Rancamaya terdiri dari 4 (empat) dusun yang terbagi dalam 28 RT dan 4 RW dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Wilayah Administratif Desa Rancamaya

Dusun	RT	RW
Dusun I	6	1
Dusun II	6	1
Dusun III	8	1
Dusun IV	8	1
Jumlah	28	4

Sumber: Pemerintahan Desa Rancamaya 2021

Desa Rancamaya yang sebagian besar merupakan area persawahan dan perkebunan, sebagai mata pencaharian di Desa Rancamaya. Terdapat, 309 orang (20,18%) bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Penduduk desa yang bermata pencaharian buruh harian lepas dan karyawan swasta juga menempati komposisi besar dengan jumlah masing-masing 540 orang (35,27%) dan 147 orang (9,60%). Berikut data jumlah mata pencaharian sebagaimana yang dimaksud:

Tabel 2.12
Jumlah Tenaga Kerja Desa Rancamaya

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1.	PNS	22	1,43
2.	TNI	2	0,13
3.	POLRI	1	0,06

No	Pekerjaan	Jumlah	%
4.	Guru	21	1,37
5.	Perdagangan	39	2,54
6.	Petani/Pekebun	309	20,18
7.	Peternak	1	0,06
8.	Nelayan/Perikanan	1	0,06
9.	Industri	13	0,84
10.	Konstruksi	3	0,19
11.	Transportasi	7	0,45
12.	Karyawan Swasta	147	9,60
13.	Buruh Harian Lepas	540	35,27
14.	Lain-Lain	425	27,75
Jumlah		1.531	100

Sumber: Pemerintah Desa Rancamaya 2021

c. Visi dan Misi Desa Rancamaya

Visi

“Menjadikan Desa Rancamaya yang Religius, Maju dalam Pendidikan Mandiri dalam Ekonomi dan Kesejahteraan”

Misi

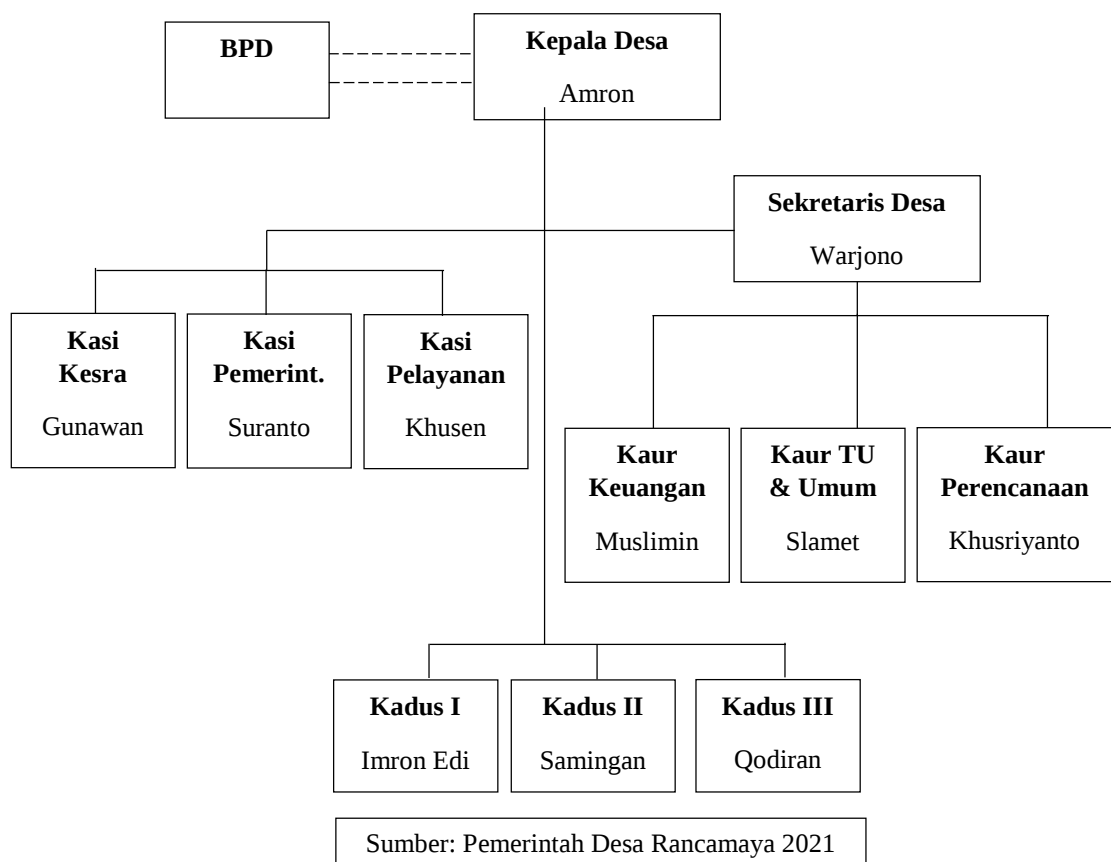
1. Mengoptimalkan pendidikan agama di sekolah, Madrasah Diniyyah, dan masyarakat
2. Pengamalan ajaran agama dalam sendi kehidupan sehari-hari
3. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat secara profesional dan ikhlas
4. Mengupayakan kemandirian masyarakat melalui potensi desa
5. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi secara aktif
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
9. Mencitakan kades Posbindu, Posyandu yang terlatih dan terampil
10. Memfasilitasi anaka berkebutuhan khusus
11. Nguri uri budaya jawa

d. Susunan Pemerintahan Desa dan BPD

1. Pemerintahan Desa

Bagan 2.1
Struktur Pemerintahan Desa Rancamaya



2. BPD Rancamaya

Tabel 2.13
Susunan Keanggotaan BPD Rancamaya

No	Nama	Jabatan
1.	Disun, S.Pd.I	Ketua
2.	Achmad Cholid	Wakil Ketua
3.	Akhmad Muzaki, S.Pd	Sekretaris
4.	Ahmad Tobroni, S.Pd.I	Kabid Pemerintahan
5.	Agus Darsono	Kabid Pembangunan
6.	Resmiyati	Kabid Kemasyarakatan
7.	Faturokhman	Anggota
8.	Sangadah	Anggota
9.	Munji Sa'bani	Anggota

Sumber: Pemerintah Desa Rancamaya 2021

Struktur kelembagaan Pemerintah Desa Rancamaya, menunjukkan bahwa kedudukan sebagai perangkat seluruhnya dipegang oleh kelompok laki-laki. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 Pasal 22 perihal batasan usia masa jabatan sebagai perangkat desa sampai dengan umur 60 tahun.⁷³ Artinya, perangkat desa khususnya di Rancamaya akan terus dijabat oleh kelompok laki-laki. Kecuali memang kedepan terdapat hal-hal sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam peraturan tersebut.

⁷³ Peraturan Bupati Banyumas No.26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas

Kecamatan dengan 18 desa ini, berjarak ± 7 km dari pusat Kabupaten Banyumas memiliki batasan-batasan dengan wilayah lainnya sebagai berikut:

Tabel 2.14
Batas-Batas Wilayah Kecamatan Sokaraja

No	Batas Wilayah	Keterangan
1.	Sebelah Utara	Kecamatan Kembaran
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Kalibagor
3.	Sebelah Barat	Kecamatan Purwokerto Selatan
4.	Sebelah Timur	Kabupaten Purbalingga

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Sokaraja Tahun 2019

No	Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	Kalikidang	5.584	2,33	2.396,57
2.	Sokaraja Tengah	6.335	1,62	3.910,49
3.	Sokaraja Kidul	2.979	1,41	2.112,77
4.	Sokaraja Wetan	7.098	1,88	3.775,53
5.	Klahang	5.224	1,81	2.886,19
6.	Banjarsari Kidul	4.827	1,61	2.998,14
7.	Jompo Kulon	3.775	1,00	3.775,00
8.	Banjaranyar	4.557	2,58	1.766,28
9.	Lemberang	1.947	1,52	1.280,92
10.	Karangduren	5.241	1,82	2.879,67
11.	Sokaraja Lor	3.684	1,56	2.361,54
12.	Kedondong	5.034	0,92	5.471,74

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
13.	Pamijen	4.253	1,04	4.089,42
14.	Sokaraja Kulon	3.747	1,84	2.036,41
15.	Karangkedawung	3.638	0,78	4.664,10
16.	Wiradadi	8.570	2,59	3.308,88
17.	Karangnanas	10.108	2,83	3.571,73
18.	Karangrau	4.036	0,78	5.174,36

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

2.3.2 Profil Desa Jompo Kulon

a. Sejarah Desa

Penamaan Desa Jompo Kulon berasal dari leluhur yang bernama Mbah Jompo. Menurut babat beliau merupakan salah satu prajurit dari Pangeran Diponegoro yang ikut berperang melawan Belanda bersama Brawijaya. Setelah melakukan peperangan, Mbah Jompo menuju arah timur mencari lokasi yang sesuai untuk menetap dan tinggal. Akhirnya menetap di pinggiran sungai serta membangun padepokan untuk menyebarkan ilmunya dan oleh masyarakat wilayah tersebut disebut Padepokan Jompo (Desa Jompo). Wafat pada tahun 1516 M dan dimakamkan dipinggiran sungai Jompo.

Secara histori, Desa Jompo Kulon dipimpin pertama kali oleh seorang Kepala Desa yang bernama H. Sadali. Berikut Kepala Desa yang pernah menjabat:

1. H. Sadali
2. Sastro Siswowiharjo

3. Martin Suyitno
4. Narsun
5. Iwan Supriyanto
6. Finita Trisela Radianingsih

b. Kondisi Geografis

Secara geografisnya, Desa Jompo Kulon memiliki luas 99,77 Ha dengan presentase 55 Ha digunakan sebagai lahan persawahan masyarakat. Kemudian, sisanya digunakan sebagai tanah pemukiman dan bangunan. Desa yang terletak di sebelah utara Kabupaten Banyumas memiliki batas wilayah dengan beberapa wilayah lainnya, yakni: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banjarsari Kidul, sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjaranyar, dan sebelah timur bertasan dengan Desa Kabupaten Purbalingga

Gambar 2.5
Peta Desa Jompo Kulon



Sumber: Pemerintahan Desa Jompo Kulon 2021

Secara kependudukan, Desa Jompo Kulon memiliki dua dusun yang terdiri dari 9 RT dan 3 RW dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2.16
Wilayah Administratif Desa Jompo Kulon

Dusun	RT	RW
Dusun I	5	2
Dusun II	4	1
Jumlah	9	3

Sumber: Pemerintahan Desa Jompo Kulon 2021

Desa Jompo Kulon yang sebagian besar merupakan area persawahan sebagai mata pencaharian penduduk. Terdapat 106 orang (12,39%) bermata pencaharian sebagai buruh tani atau perkebunan. Sejumlah 33 orang (3,85%) sebagai petani atau pekebun. Penduduk desa yang bermata pencaharian buruh harian lepas dan karyawan swasta juga menempati komposisi besar dengan jumlah masing-masing 117 orang (13,68%) dan 302 orang (35,32%). Berikut data jumlah mata pencaharian sebagaimana yang dimaksud:

Tabel 2.17
Jumlah Tenaga Kerja Desa Jompo Kulon

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1.	PNS	31	3,62
2.	TNI	4	0,46
3.	POLRI	8	0,93
4.	Guru	17	1,98
5.	Pedagang	92	10,76
6.	Petani/Pekebun	33	3,85

No	Pekerjaan	Jumlah	%
7.	Peternak	-	-
8.	Nelayan/Perikanan	-	-
9.	Industri	-	-
10.	Buruh Tani/Perkebunan	106	12,39
11.	Transportasi	1	0,11
12.	Karyawan Swasta	302	35,32
13.	Buruh Harian Lepas	117	13,68
14.	Lain-Lain	145	16,95
Jumlah		855	100

Sumber: Pemerintahan Desa Jompo Kulon 2021

c. Visi dan Misi Desa Jompo Kulon

Visi

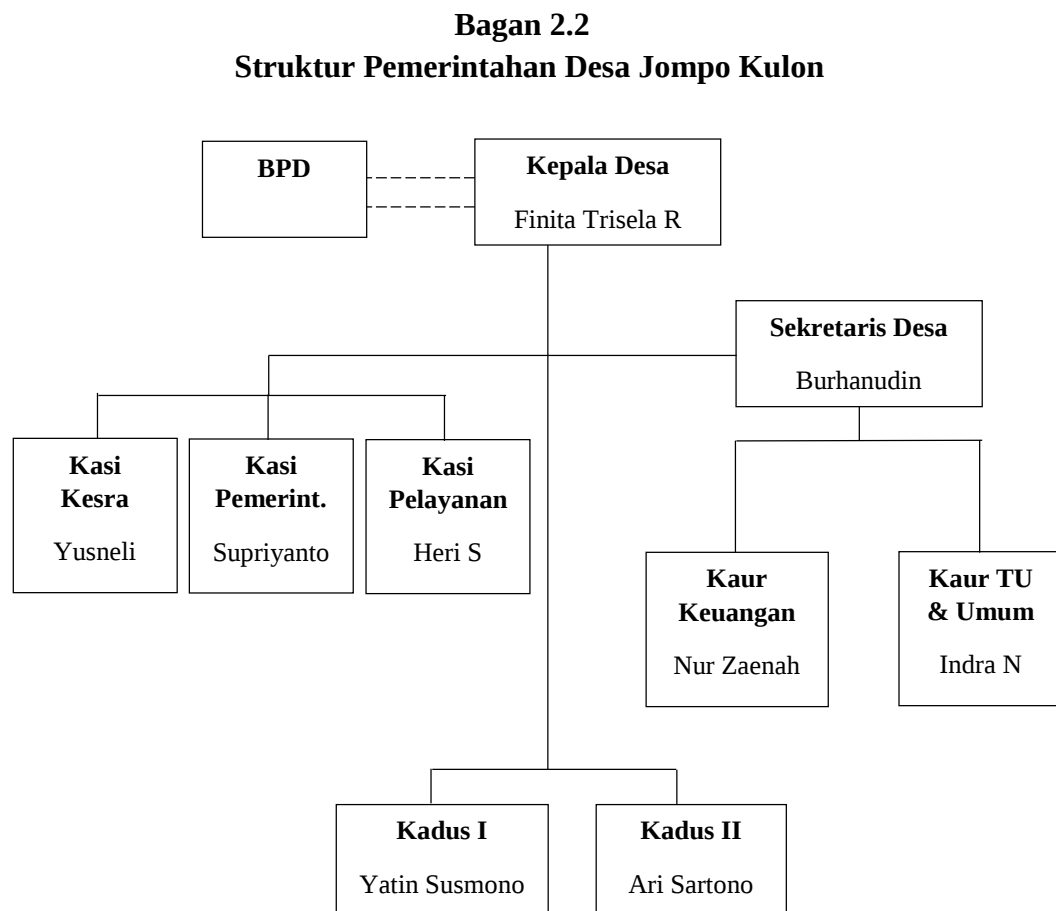
“Terwujudnya Desa Jompo Kulon yang maju, aman, nyaman dan kompetitif sesuai dengan kaidah agama dan negara”

Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Memajukan desa di bidang pembangunan mental dan infrastruktur
3. Menuju desa yang mandiri

d. Struktur Pemerintahan Desa dan BPD

1. Pemerintahan Desa



Sumber: Pemerintah Desa Jompo Kulon 2021

2. BPD Jompo Kulon

Tabel 2.18
Susunan Keanggotaan BPD Jompo Kulon

No	Nama	Jabatan
1.	Rosidin	Ketua
2.	Slamet Riyanto	Wakil Ketua
3.	Yetti Dwi K, S.Pd.	Sekretaris
4.	Maulidah, S.Pd.	Kabid Pemerintahan
5.	Siswoyo Pujiyanto	Kabid Pembangunan

6.	Mukti Eismu T, A.Md	Kabid Pemberdayaan
7.	Suharno	Anggota

Sumber: Pemerintahan Desa Jompo Kulon 2021

Unsur perempuan dalam kelembagaan baik Pemerintah Desa maupun BPD di Jompo Kulon sudah terpenuhi. Kedudukannya dalam mengisi jabatan-jabatan strategis membawa arah dan pengaruh yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Majemuknya masyarakat di desa, menjadikan kehadiran dan keterwakilan perempuan di Jompo Kulon dalam kelembagaan merupakan kebutuhan.⁷⁵

Seperti halnya dalam keterwakilan BPD perempuan sebelum berlakunya UU Desa, perempuan sudah berkontribusi untuk mewakili kelompoknya.⁷⁶

Pemerintahan Desa (eksekutif) maupun Badan Permusyawaratan Desa (legislatif) memiliki hak dan berwenang dalam melakukan proses perumusan hingga pelaksanaan peraturan dan program kerja di desa. Keduanya memegang peranan sebagai aktor penting dalam menentukan arah pembangunan dan perkembangan desa baik secara fisik (infrastruktur) maupun non-fisik (pemberdayaan dan pembangunan sumber daya manusia). Salah satunya yaitu pada fokus pembangunan perempuan dan anak.

⁷⁵ Wawancara Iwan, Kepala Desa Jompo Kulon Kec. Sokaraja (2013-2019), 04 Februari 2021 pukul 08.12 WIB

⁷⁶ Wawancara Yetti, Sekretaris BPD Jompo Kulon Kec. Sokaraja, 04 Februari 2021 pukul 13.47 WIB

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memberi arah gerak yang lebih luas bagi proses demokratisasi dalam pemerintahan yang ada di desa. Termasuk kehadiran kelompok-kelompok dalam kelembagaan yang ada di desa. Sejalan dengan hal tersebut, kelembagaan desa diisi dengan komponen-komponen yang proporsional. Dengan kehadiran perempuan pada kelembagaan memberikan dampak yang berbeda terhadap luaran dari kebijakan itu sendiri khususnya menyangkut pada kepentingan kelompoknya.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kesetaraan dapat dilihat mulai dari proses perekrutan dari keanggotaan lembaga desa termasuk keterbukaan kepada perempuan. Pada pasal 58 keanggotaan BPD memuat dan memperhatikan unsur perempuan.

Menurut data yang diambil dari Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Oktober 2020, tercatat 18,2% perangkat desa perempuan atau setara 597 orang dan 4,09% setara 73 orang untuk keanggotaan BPD berjenis kelamin perempuan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keikutsertaan dari unsur perempuan di level politik perdesaan masih terbilang kecil.

Pada tingkat kabupaten, unsur pelaksana program pembangunan yang kaitannya dengan perempuan dipegang oleh forum Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Namun, ketepatan sasaran berdasar pada tujuan program yang diusulkan juga memerlukan koordinasi dan dukungan ditingkat desa dalam hal ini dibahas bersama dengan penyelenggaraan pemerintah di level desa baik pemerintahan desa maupun BPD.

Tidak hanya dalam proses keberjalanan pemerintahan desa saja, kedudukan lembaga-lembaga lain yang ada di desa juga merupakan wujud

representasi kelompoknya masing-masing sesuai dengan identitas yang dibawahnya dalam melaksanakan, mendukung hingga mensukseskan program-program kerja baik untuk ditingkat desa maupun internal lembaganya guna mewujudkan pembangunan baik fisik dan non-fisik yang ada di desa. Terciptanya pemerataan kedudukan antar elemen di desa yang setara dan seimbang berdampak baik pada proses perkembangan desa itu sendiri.